



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	7

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dugaan Korupsi Obat RSUD Tapan Terus Diusut

PESSEL, METRO

Bergulirnya kasus korupsi yang bergulir di RSUD Pratama Tapan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah, WI (pihak manajemen konstruksi), NN (PPK Kementerian Kesehatan) dan FI (penyedia jasa). Dengan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar.

Bukan berhenti di situ, tim Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Painan saat

ini juga sedang menyimpulkan hasil dari dugaan pengadaan obat pada tahun 2017 itu. Dengan total anggaran Rp13 miliar di RSUD Pratama Tapan.

Hal itu dibenarkan Kejari Pessel. Yeni Puspita, SH, MH melalui Kasi Intel Kejari Painan Agustian, Selasa (14/1). Katanya, sejauh ini tim dari Kejari Painan telah melakukan pemeriksaan dari pihak farmasi RSUD Pratama Tapan, pada awal bulan Januari yang lalu.

Sejauh ini sebagaimana diketahui jika obat tersebut yang disinyalir telah kedaluarsa, memang ditemukan. Tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan dari pihak rumah sakit bersangkutan telah meminta ganti obat, dan informasinya pihak perusahaan obat telah mengganti.

"Bisa jadi dasar dari ganti rugi tersebut, adalah atas dasar surat pesanan e-katalog, kalau penyedia melakukan wan prestasi (ingkar janji). Misalnya obat yang

diadakan tidak sesuai bisa dilakukan penuntutan dari yang beli," tegas Agustian.

Sementara dalam pengadaan obat tersebut, dilakukan secara e-katalog dan bukan lelang umum. Sedangkan obat itu tersendiri dipergunakan di rumah sakit, dan tidak untuk diperjualbelikan pada masyarakat umum. Setelah itu obat tersebut langsung disetop.

Untuk jenis obat-obatnya banyak, berbagai jenis dan nama. Ungkap Kasi Intel Kejari Painan itu. "Ber-

sama Tim lainnya, kita sedang bekerja, nantinya di simpulkan oleh tim, dan tim sedang menyusun laporannya," kata dirinya.

Penyelidikan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya indikasi korupsi pada proyek senilai Rp13 miliar tersebut. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), lanjut Endra, proyek pembangunan RSUD Tapan ternyata telah merugikan keuangan negara hingga Rp1,6 miliar. (rio)